

Peran Partai Politik dalam Pelaksanaan Pemilu di Indonesia

Deri Gymnastiar

Universitas Cokroaminoto Yogyakarta, Indonesia

e-mail: derigymnastiar764@gmail.com

Abstrak

Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan sebuah bentuk lembaga yang sangat penting untuk dapat mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia untuk dapat berjalan dengan baik dan partai politik dapat memastikan bahwa sistem politik di Indonesia dapat berjalan dengan lancar untuk dapat menjadi representasi rakyat dalam menyalurkan aspirasi yang ada. Selain itu untuk menjadi sebuah partai politik yang baik di sebuah negara, seharusnya partai politik dapat mengimplementasikan nilai-nilai Demokrasi dan Pancasila untuk dapat menjadi sebuah falsafah dalam menentukan sebuah kebijakan. Akan tetapi, saat ini di Indonesia dengan beragamnya keberadaan partai politik, keberadaan partai politik belum sepenuhnya dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini dapat ditunjukkan dengan masih tingginya berbagai kecurangan yang terjadi pada proses Pemilu yang mana seharusnya partai politik dapat menjadi sebuah jembatan untuk dapat mencegah terjadinya kecurangan tersebut yang dapat memberikan dampak negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara

Kata kunci: *Partai politik, Pemilu, Demokrasi, Pancasila*

Abstract

The existence of political parties in Indonesia is important to be able to influence the political system in Indonesia to run well and political parties can ensure that the political system in Indonesia can run smoothly to be able to represent the people in channeling existing aspirations. In addition to being a good political party in a country, political parties should be able to implement the values of democracy and Pancasila to become a philosophy in determining a policy. However, currently in Indonesia with the existence of various political parties, the existence of political parties cannot be fully implemented properly. This can be shown by the high number of frauds that occur in the election process where political parties should be a bridge to prevent fraud which can have a negative impact on the life of the nation and state

Keywords: *Political parties, Elections, Democracy, Pancasila*

PENDAHULUAN

Keberadaan partai politik di Indonesia merupakan sebuah bentuk kelembagaan yang memiliki peran yang penting dalam melakukan intervensi pemerintah. Dikarenakan dengan adanya kehadiran partai politik di Indonesia, partai politik dapat menjadi sebuah bentuk upaya dalam mempengaruhi pemerintah dalam membentuk budaya atau sikap. Dan keberadaan partai politik dapat menjadi semakin efektif apabila partai politik dapat membentuk saluran kelembagaan yang digunakan untuk menampung berbagai partisipasi politik dan partisipasi politik yang terkumpul dapat diserahkan kepada pemerintah agar dapat diatasi dan dikelola dengan baik dan benar. Sebuah partai politik yang terbentuk di Indonesia merupakan sebuah partai politik yang lahir berdasarkan pada ideologi yang dianut oleh partai tersebut. Dan sebuah ideologi yang dianut menjadi sebuah identitas partai (Romli, 2011).

Terlebih Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi. nilai-nilai demokrasi tersebut tidak hanya dapat terjamin dilakukan oleh masyarakat di sebuah negara, melainkan sebuah

aktor negara melalui berbagai partai politik yang ada di Indonesia dapat mengimplementasikan nilai-nilai yang tercantum sebagai pedoman negara seperti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Di Indonesia terdapat berbagai ideologi partai politik sebanyak tujuh partai politik, diantaranya adalah Golkar yang memiliki paham ideologi Pancasila, Demokrat yang memiliki paham ideologi berdasarkan Pancasila, PPP merupakan Partai politik dengan ideologi berlandaskan Islam, PKB merupakan sebuah Partai Politik dengan Ideologi Pancasila, PDI-P yang merupakan sebuah partai Politik dengan berlandaskan ideologi Pancasila, PAN yang merupakan Partai Politik dengan ideologi Pancasila, dan PKS yang merupakan sebuah partai Politik dengan berlandaskan Islam (Prasetya, 2011). Oleh karena itu, dengan terbentuknya berbagai Partai Politik di Indonesia, hal ini tidak sepenuhnya Partai Politik memiliki ideologi yang sama, melainkan masing-masing Partai Politik memiliki ideologi yang berbeda berdasarkan nilai-nilai yang dianut.

Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara dengan menerapkan sistem demokratis, hal ini memberikan perubahan yang terjadi di dalam sebuah dinamika kehidupan politik dengan membentuk Partai Politik berdasarkan masing-masing ideologi yang dibentuk. Adapun perbedaan ideologi oleh masing-masing Partai Politik, hal ini memiliki perbedaan antara ideologi Pancasila dan ideologi dengan berlandaskan Islam. Adapun perbedaannya adalah ideologi Islam yang merupakan sebuah ideologi yang diterapkan oleh Partai-partai Islam, yang mana pada partai ini adanya konsep Islam yang diimplementasikan yakni *amar ma'ruf nahi munkar* dan rahmatan lil alamin, yang diimplementasikan oleh partai politik Islam, yakni PAN dan PKB. Sedangkan pada Partai Politik yang berlandaskan pada ideologi Pancasila, yakni PDIP dan partai Demokrat memiliki ideologi yang berbeda yang mana pada Partai Politik Demokrat, partai ini lebih mengedepankan nasionalisme sebagai ideologi dengan tidak membedakan keberagaman yang ada di Indonesia seperti ras, bangsa, suku, jenis kelamin, agama, profesi, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan Partai Politik PDIP memiliki pendirian bahwa sebuah rasa nasionalisme di Indonesia dapat memiliki keterkaitan dengan wawasan kebangsaan untuk terus memiliki rasa berbangsa dan bernegara yang harus terus dilestarikan (Romli, 2011). Oleh karena itu, dengan adanya kondisi Partai Politik di Indonesia yang beragam serta memiliki ideologi yang bervariasi baik itu menganut ideologi Pancasila maupun Islam, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masing-masing Partai Politik di Indonesia harus terus membentuk tujuan nasional negara dan mengupayakan untuk terus mengimplementasikan nilai-nilai demokrasi di Indonesia secara baik dan benar.

Oleh karena itu, dengan adanya identitas partai yang dimiliki, partai politik dapat menjadi sebuah dasar dalam mencapai cita-cita maupun perjuangan yang ingin dicapai oleh partai politik dan dengan adanya ideologi yang dianut oleh masing-masing partai politik ideologi ini dapat menjadi sebuah aspek dalam melakukan intervensi terhadap pemerintah dengan memberikan perspektif yang dimiliki untuk dapat dilakukan oleh Pemerintah, khususnya untuk dapat menciptakan proses pemilihan umum di Indonesia dengan baik. Adapun sebuah ideologi yang dimiliki oleh masing-masing partai politik di Indonesia saat ini memiliki dua bentuk ideologi yang dianut, diantaranya adalah ideologi yang berdasarkan pada nasionalis dan Islam. Dan ideologi tersebut dapat menjadi acuan bagi masing-masing partai politik untuk dapat memaksimalkan perannya dalam menyalurkan aspirasi masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup berbangsa dan bernegara. Dikarenakan partai politik memiliki kemampuan untuk menjadi penghubung yang memiliki posisi yang strategis antara warga negara dan pemerintah.

METODE

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat kualitatif yang merupakan sebuah prosedur untuk menghasilkan data berbentuk deskriptif. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, hal ini diharapkan peneliti mampu untuk menghasilkan uraian yang mendalam terkait ucapan, tulisan, hingga sebuah perilaku yang diamati baik dari kelompok, individu, hingga kelompok masyarakat. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, penulis dapat menguraikan

data dalam bentuk deskriptif dan jawaban dari sebuah penelitian dapat terjadi dan dianalisis dengan baik.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah menggunakan data-data sekunder. Data-data sekunder yang dipilih adalah berasal dari data-data yang akurat seperti buku, e-book, jurnal, dan artikel yang berasal dari publikasi yang terpercaya dengan adanya pengumpulan data melalui data sekunder. Oleh karena itu, melalui penelitian yang dilakukan, sebuah penelitian dapat menghasilkan sebuah penelitian secara baik dan akurat.

Proses Penelitian

Proses penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, yang mana peneliti mengumpulkan berbagai informasi-informasi atau data-data yang berasal dari data sekunder. Setelah itu, data sekunder yang telah terkumpul, hal ini dapat dijadikan kalimat per paragraf dan peneliti melakukan analisis terkait judul yang telah diajukan. Dengan adanya analisis tersebut, analisis dapat dikaitkan dengan menggunakan referensi yang telah terkumpul. Oleh karena itu, adanya proses ini melalui berbagai literatur yang terkumpul dan melakukan sebuah analisis, hal ini dapat memudahkan peneliti untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Partai politik merupakan sebuah variabel yang memiliki peran yang penting untuk dapat memberikan pengaruh baik terhadap peningkatan kualitas partisipasi politik rakyat di sebuah negara. Akan tetapi, yang seharusnya partai politik dapat menjadi acuan rakyat untuk dapat berpartisipasi baik di dalam kancah politik dan turut serta mengambil keputusan dengan baik dalam memiliki kandidat pemimpin, saat ini peran partai politik di Indonesia terlihat belum dapat terimplementasikan dengan maksimal dikarenakan adanya berbagai permasalahan yang kerap kali dihadapi oleh masing-masing partai politik seperti adanya politik uang dan korupsi yang dilakukan oleh partai politik Indonesia (Wahyuningroem, 2021). Dan dengan adanya tindakan-tindakan negatif yang dilakukan, tindakan tersebut menjadikan peran partai politik semakin tidak efektif dikarenakan yang pada awalnya peran partai politik bertujuan untuk menampung berbagai aspirasi masyarakat untuk dihubungkan terhadap aktor negara, yakni pemerintah. Akan tetapi dengan adanya tindakan negatif yang dilakukan, hal ini mengakibatkan aspirasi rakyat Indonesia menjadi sulit untuk dapat dijemputan kepada pemerintah dikarenakan partai politik yang berdiri lebih memikirkan keuntungan pribadi dengan menghalalkan berbagai cara agar kandidatnya terpilih dan mengabaikan aspirasi masyarakat untuk dapat diatasi.

Oleh karena itu, dengan adanya tindakan kecurangan maupun tindakan negatif yang dilakukan oleh partai politik mengakibatkan tindakan tersebut menjadi peran partai politik semakin tidak efektif yang mana seharusnya peran partai politik dapat melakukan intervensi terhadap pemerintah dalam menyalurkan berbagai aspirasi masyarakat yang masuk. Dan sebuah intervensi partai politik terhadap partai politik memiliki sebuah kesempatan yang besar dikarenakan dengan adanya kehadiran partai politik dapat membentuk dan menyiapkan kader-kader yang akan terpilih menjadi pimpinan politik, menempatkan kader yang memiliki dedikasi, kualitas, dan kredibilitas yang tinggi untuk dapat memiliki dukungan yang berasal dari masyarakat (Sirajuddin, 2009). Partai politik juga dapat didefinisikan sebagai kelompok partai yang terorganisasi dengan adanya tujuan untuk dapat memperoleh jabatan-jabatan pemerintahan dan anggota kelompok partai politik dapat memiliki cita-cita, nilai-nilai dan orientasi yang sama terhadap pemerintah.

Dan sebuah partai politik muncul di dalam tatanan masyarakat dikarenakan adanya kepentingan yang terbentuk, diantaranya adalah adanya ideologi tertentu yang mengakibatkan kelompok partai politik ingin memiliki kepentingan untuk dapat berpartisipasi secara idealisme dan politik, selain itu, partai politik juga muncul dikarenakan adanya kelompok masyarakat yang memiliki kekuatan (power) baik itu berasal dari kemampuan intelektual, ekonomi, dan kekuatan massa untuk dapat memperjuangkan kelompok partai politik dan menjadi wakil pemerintahan. Adanya kepentingan-kepentingan tersebut merupakan sebuah hal yang menunjukkan bahwa partai politik dapat memiliki kesempatan

untuk mengintervensi pemerintah. Dikarenakan adanya partai politik di masing-masing daerah di Indonesia, sebenarnya keberadaan partai politik dapat memainkan peran yang maksimal untuk dapat menampung terlebih dahulu berbagai aspirasi yang berasal dari warga negara baik itu berupa keluhan maupun kritisi kinerja pemerintah yang dapat partai politik tampung. Dengan mengetahui berbagai aspirasi yang berasal dari rakyat, aspirasi tersebut akan memudahkan para kelompok partai politik untuk dapat merumuskan komunikasi vertikal dan horizontal terhadap pemerintah (AW, 2017).

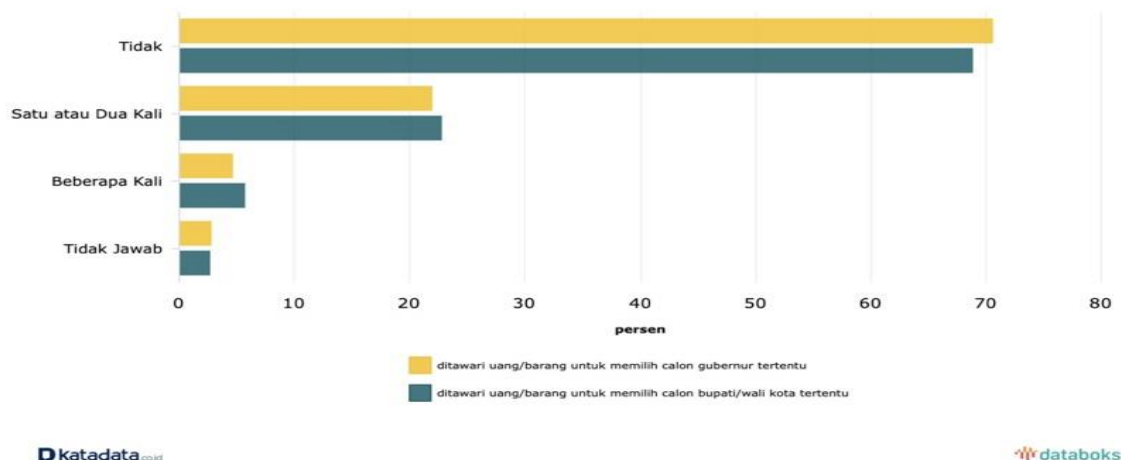
Dikarenakan masyarakat di masing-masing daerah di Indonesia tentunya belum memiliki kapabilitas yang sepadan layaknya kapabilitas yang dimiliki oleh partai politik untuk dapat menyampaikan berbagai aspirasi. Oleh karena itu, intervensi pemerintah yang dapat dilakukan oleh partai politik merupakan sebuah agenda yang harus dilakukan dikarenakan tanpa adanya intervensi pemerintah yang dilakukan oleh partai politik, keberadaan partai politik di Indonesia akan muncul dengan tidak efektif. Dikarenakan keberadaan partai politik muncul dikarenakan untuk menjamin bahwa aspirasi yang berasal dari masyarakat dapat terhubung ke tingkat pemerintah. Selain itu, Adapun latar belakang yang dari keberadaan partai politik di Indonesia memiliki latar belakang yang beragam. Berdasarkan data dari BBC Indonesia menjelaskan bahwa terdapat calon kandidat anggota dari partai politik yang mana kandidat tersebut berasal dari latar belakang profesional yang beragam. Adapun latar belakang tersebut memiliki dominasi yang berasal dari anggota DPR, akan tetapi hal ini tidak menutup kemungkinan adanya kandidat kepala daerah yang berasal dari latar belakang yang lainnya juga seperti berasal dari pengusaha, pimpinan perusahaan, akademisi, politisi dan birokrat (BBC Indonesia, 2018).

Yang mana kandidat-kandidat tersebut merupakan memiliki latar belakang profesi yang pada dasarnya profesi tersebut selaras dengan pandangan yang berasal dari Roscoe Pound yang menjelaskan bahwa profesi tersebut merupakan bukan latar belakang kapitalis, pekerja atau buruh, petani, dan birokrat. Dan sebuah latar belakang profesi tersebut menunjukkan pada institusi-institusi yang terorganisasikan yang berada dalam lingkup ilmu disiplin intelektual, diantaranya adalah ilmu-ilmu humaniora, ilmu-ilmu alam, dan ilmu-ilmu sosial, dan juga yang memiliki latar belakang pada sistem kultural atau nilai-nilai (Hastuti, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya latar belakang yang beragam yang dimiliki oleh anggota partai politik di Indonesia, latar belakang dan kemampuan yang dimiliki dapat senantiasa dimaksimalkan untuk dapat melakukan intervensi terhadap pemerintah di bidangnya masing-masing untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang muncul di berbagai aspek. Oleh karena itu, dengan adanya intervensi yang dilakukan oleh partai politik terhadap pemerintah, intervensi yang dilakukan dapat berguna untuk mempengaruhi berbagai kebijakan yang akan dibentuk oleh pemerintah.

Adapun peran partai politik diantaranya adalah sebagai sarana sosialisasi politik yang merupakan sebuah proses untuk dapat membentuk orientasi politik dan sikap para anggota masyarakat, sebagai sarana komunikasi politik yang dapat menjadi proses penyampaian informasi terkait politik yang berasal dari pemerintah terhadap masyarakat dan begitu juga sebaliknya, sebagai sarana rekrutmen politik yang merupakan adanya sekelompok orang untuk dapat melaksanakan sejumlah peran yang terdapat pada sistem politik, partai politik juga dapat memainkan peran sebagai sebagai pengelola konflik, dikarenakan partai politik memiliki kemampuan untuk dapat mengendalikan berbagai konflik yang muncul baik itu melalui aktivitas dialog terhadap pihak yang sedang berkonflik, menampung berbagai aspirasi dan kepentingan yang berasal dari pihak-pihak berkonflik, sebagai sarana artikulasi dan agregasi kepentingan untuk dapat menyalurkan kepentingan yang terdapat pada masyarakat.

Selain itu, sebuah pemilu di Indonesia yang menjadikan proses pemilu tidak berintegritas dikarenakan tingginya kasus politik uang yang kerap kali terjadi. Dan hal ini juga dapat menjadi salah satu acuan terhadap KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) untuk dapat turut andil jika terdapat upaya-upaya dalam melakukan kecurangan seperti politik uang, korupsi, penggelapan pajak, tindakan SARA, dan tindakan asusila atau etika. Dikarenakan Indonesia merupakan sebuah negara demokrasi yang mana seharusnya sebuah negara dapat mematikan untuk melakukan kontrol terhadap negara. Dan praktik politik uang ini semakin

meningkat dikarenakan adanya sistem proporsional secara terbuka yang menjadikan para cales dapat menghalalkan segala cara untuk mencapai suara terbanyak di sebuah partai (Muhtadi, 2019).



Sumber : Lembaga Survei Indonesia, 10 Januari 2021

Data diatas merupakan sebuah data yang berasal dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) dari Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pilkada pada tahun 2020. Dengan adanya data tersebut telah menjelaskan bahwa politik uang masih sering terjadi di indonesia dalam melakukan Proses Pemilihan Umum. selain itu, berdasarkan data dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menjelaskan bahwa praktik politik uang yang dilakukan dalam proses Pemilu, masih memberikan pengaruh yang signifikan, salah satunya adalah ketika pemilu yang diselenggarakan pada 2019 lalu. Adanya tindakan politik uang, suap menyuap merupakan salah satu tindakan pidana yang masuk ke dalam tindakan korupsi sebagaimana telah dijelaskan dalam pidana korupsi nomor 31 tahun 1999 dan saat ini telah diubah menjadi undang-undang nomor 20 tahun 2001.

Dan tindakan korupsi merupakan sebuah tindakan buruk yang dilakukan berupa penggelapan uang, tindakan dalam menerima uang sogok, dan lain sebagainya. adanya sebuah kekuasaan berupa jabatan yang dimiliki kemudian disalahgunakan untuk melakukan sebuah rumusan korupsi yang mana tindakan tersebut sepenuhnya bertentangan dengan norma-norma di dalam tatanan masyarakat seperti norma adat, norma agama, dan norma hukum (Budiman, 2020). Dan sebuah tindakan yang dilakukan pada saat proses dalam melakukan Pemilihan Umum merupakan sebuah tindakan yang sangat bertentangan dengan regulasi hukum yang ada dikarenakan sebuah tindakan negatif tersebut senantiasa berupaya untuk meraih keuntungan pribadi dan sebuah tindakan politik uang yang dilakukan merupakan sebuah praktik yang menyimpang dari sebuah nilai-nilai demokrasi dan Pancasila yang seharusnya nilai-nilai demokrasi dan falsafah negara harus diimplementasikan dan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari dalam berperilaku. Dikarenakan adanya tindakan politik uang merupakan sebuah tindakan yang dikategorikan sebagai korupsi pemilu dalam membentuk manipulasi suara dan menyimpang aturan-aturan hukum yang berlaku (Husin et al., 2019).

Dan seharusnya Adapun sebuah bentuk kepemimpinan yang baik adalah sebuah kepemimpinan yang dapat mencapai kepentingan bersama di sebuah negara dari pada kepentingan pribadi. Selain itu, untuk mencapai tujuan nasional pembangunan, sebuah kepemimpinan yang berlandaskan Pancasila, diperlukan untuk melibatkan warga negara dalam menentukan sebuah kebijakan secara adil, jujur, akuntabel, dan terbuka. Dengan adanya keterlibatan warga negara dalam merumuskan proses kebijakan, hal ini juga dapat dipastikan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang pemimpin negara tidak merugikan

rakyat dikarenakan sebuah pembangunan yang dilakukan, hal ini merupakan proses dalam mencapai kemakmuran rakyat (Pusdatin, 2021). Selain itu, untuk mencapai tujuan nasional, sebuah kepemimpinan yang ada di sebuah negara, yakni Indonesia harus menanamkan pada nilai ketuhanan, nilai persatuan, nilai kemanusiaan, dan nilai keadilan, dengan memastikan tidak ada kelompok yang tertindas dan dirugikan, tanpa memihak siapapun dan dapat mencapai tujuan bersama.

Dikarenakan sebuah pengimplmentasian sistem demokrasi dan nilai-nilai Pancasila, demokrasi merupakan sebuah bentuk yang dijalankan oleh sistem pemerintahan sebuah negara untuk mengupayakan terwujudnya kedaulatan rakyat maupun negara dengan adanya sistem demokrasi yang dijalankan oleh pemerintah. Dalam mengimplementasikan sebuah sistem demokrasi oleh sebuah negara, aktor negara, yakni pemerintah dapat terus memastikan bahwa sistem demokrasi yang dilakukan telah meliputi berbagai aspek di sebuah negara diantaranya adalah aspek ekonomi, sosial, politik, hingga budaya dengan dapat memberikan sebuah praktik dalam melakukan kebebasan secara politik yang setara, bebas, dan terbuka (Astawa, n.d.). Dan tindakan demokrasi sangat melarang adanya tindakan politik uang yang dilakukan dikarenakan nilai-nilai Pancasila dan demokrasi senantiasa terus mengedepankan kejujuran dan keadilan sosial yang terbentuk di dalam tatanan masyarakat.

Oleh karena itu, dengan tingginya berbagai bentuk tindakan asusila yang dilakukan di dunia perpolitikan saat ini, hal ini seharusnya dapat menjadi sebuah peran partai politik untuk dapat mencegah tindakan menyimpang terjadi. Partai politik seharusnya memiliki kemampuan untuk dapat menjadi seorang mediator antara keinginan masyarakat dan kebutuhan serta responsivitas dari pemerintah untuk dapat mendengar tuntutan rakyat (Ashari, 2020). Oleh karena itu, dengan adanya peran yang dimiliki oleh partai politik, peran-peran tersebut dapat menjadi upaya yang dilakukan oleh partai politik untuk melakukan intervensi terhadap pemerintah dikarenakan partai politik dapat memaksimalkan perannya untuk mewakili kepentingan rakyat untuk dapat diserahkan kepada pemerintah dan memastikan bahwa intervensi yang dilakukan dapat berkontribusi baik terhadap seluruh kehidupan bangsa dan negara.

SIMPULAN

Indonesia, salah satunya adalah pemilihan umum yang kerap kali berbagai kandidat melakukan berbagai praktik yang dapat memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini seharusnya peran partai politik dapat dimaksimalkan untuk dapat memantau dan menjadikan sebuah partai yang dijalankan untuk senantiasa berpedoman pada nilai-nilai demokrasi dan pancasila di setiap tindakan yang diambil. Dikarenakan nilai-nilai demokrasi dan pancasila dapat menjadi sebuah falsafah untuk dapat menciptakan tatanan negara yang damai dengan adanya kontribusi dari Partai Politik untuk dapat mengimplementasikan berbagai aspirasi masyarakat yang muncul dan partai politik seharusnya dapat menjadi sebuah acuan dalam menciptakan kader-kader yang baik dengan tidak melakukan tindakan yang menyimpang. Oleh karena itu, dengan adanya keberadaan partai politik di Indonesia, seharusnya partai politik dapat menjadi kelompok representasi dari penyaluran aspirasi rakyat untuk dapat dilakukan dengan semaksimal mungkin dengan tidak melakukan berbagai tindakan yang menyimpang yang akan berdampak buruk terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashari, E. T. (2020). *Formulasi Hubungan Birokrasi Pemerintah Dengan Partai Politik Dalam Konters Good Local Governance*.
- AW, M. J. (2017, September). *Peranan Partai Politik Dalam Demokrasi di Indonesia*, 10.
- Muhtadi, B. (2019). *Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Pasca-Orde Baru*, 1(Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS), 55-74.
- Romli, L. (2011, November). *Reformasi Partai Politik dan Sistem Kepartaian di Indonesia*, 2.
- Sirajuddin. (2009). *Implementasi Peran Partai Politik Dalam Peningkatan partisipasi Politik Masyarakat*, 7.

Wahyuningroem, S. L. (2021). *Masalah-Masalah Pantai Politik Indonesia*, 2.